

**PERSEPSI TENAGA HONOR MENGENAI ATURAN PAKAIAN
HONORER (Studi Kasus Guru Honorer di Desa Ulaweng Cinnong
Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone)**

RAHMAH WILDANAH
Pendidikan Sosiologi FIS-UNM

ABSTRAK

Rahmah Wildanah, 2019. *Persepsi Tenaga Honor Mengenai Aturan Pakaian Honorer (Studi Kasus: Guru Honorer di Desa Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone)*. Skripsi ini dibimbing oleh Muhammad Syukur dan M. Ridwan Said Ahmad. Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) Persepsi guru honor mengenai aturan pakaian honorer di Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone. 2) Dampak sosial yang dialami oleh guru honorer selama diterapkannya aturan pakaian honorer di Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik dalam menentukan informan menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria yaitu guru honorer yang telah menjalani profesinya selama 6 tahun, yang merasakan perubahan seragam kerja dari mengenakan pakaian dinas harian yang sama dengan PNS hingga mengenakan pakaian putih bawahan hitam sesuai dengan aturan. Jumlah informan sebanyak 11 guru honorer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif tipe deskriptif melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data menggunakan *membercheck*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Persepsi guru honor mengenai aturan pakaian honorer di Desa Ulaweng Cinnong melahirkan persepsi pro maupun kontra dikalangan honorer itu sendiri. Persepsi guru honorer yang setuju terhadap aturan pakaian beralasan dengan adanya aturan berpakaian terhadap honorer diharapkan mampu menjadi pembeda bagi guru honorer tersebut sehingga kinerjanya dapat lebih di nilai baik di lingkungan kerjanya. Adapun persepsi guru honorer lainnya yang tidak setuju dengan aturan pakaian karena beranggapan perlunya memakai seragam selayaknya guru PNS yang pada dasarnya perannya sama dengan seorang guru yang digaji oleh Negara. 2) Dampak sosial yang dialami oleh guru honorer selama diterapkannya aturan pakaian honorer dibedakan menjadi dampak dalam aspek fungsional dan aspek disfungsional. Dampak dalam aspek fungsional yaitu honorer dan PNS secara cepat lebih mudah dibedakan, memudahkan pengawasan kinerja honorer dan PNS dan memudahkan pengawasan disiplin kerja honorer dan PNS. Adapun dampak dalam aspek

disfungsional adalah semangat kerja honorer berkurang dan kurangnya kepercayaan diri honorer.

ABSTRACT

Rahmah Wildanah, 2019. *Perceptions of Honor Personnel Regarding the Rules of Honorary Clothing (Case Study: Honorary Teacher in Ulaweng Cinnong Village, Ulaweng District, Bone Regency).* This thesis is guided by Muhammad Syukur and M. Ridwan Said Ahmad. Sociology Education Study Program, Faculty of Social Sciences, Makassar State University.

This study aims to determine; 1) The perception of honorarium teachers regarding the rules of honorary clothing in Ulaweng Cinnong Village, Ulaweng District, Bone Regency. 2) The social impact experienced by honorary teachers during the implementation of honorary clothing rules in Ulaweng Cinnong Village, Ulaweng District, Bone Regency. This type of research is descriptive qualitative. The technique in determining informants uses *purposive sampling*, with the criteria that the honorer teacher who has undergone his profession for 6 years, who feels a change in work uniforms from wearing the same daily official clothes with civil servants to wearing white subordinate white clothes in accordance with the rules. The number of informants is 11 honorary teachers. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Descriptive type qualitative data analysis techniques through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The data validation technique is using member *check*.

The results showed that; 1) The perception of honorarium teachers regarding the rules of honorary clothing in Ulaweng Cinnong Village gave birth to pros and cons perceptions among the honorary themselves. The perception of honorary teachers who agree with the rules of clothing is reasonable with the existence of dress codes for honorariums expected to be able to be a differentiator for the honorary teacher so that their performance can be better rated in their work environment. As for the perception of other honorary teachers who disagree with the rules of dress because they think the need to wear uniforms is like a PNS teacher whose role is basically the same as a teacher who is paid by the State. 2) The social impact experienced by the honorary teacher during the application of the honorary clothing rule can be divided into impacts in functional and dysfunctional aspects. Impacts on functional aspects, namely honorary and civil servants, are more easily distinguished, facilitate monitoring of the performance

of honorary and civil servants and facilitate the supervision of the work discipline of honorary and civil servants. The impact on the dysfunctional aspect is that the morale of the honorary work is reduced and the lack of honorary confidence.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh bangsa dan negara dalam membina dan mengembangkan kepribadian, baik jasmani maupun rohani dengan tujuan yang membahagiakan. Bidang pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang sangat fundamental dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan, di samping juga merupakan faktor penentu bagi perkembangan sosial dan ekonomi ke arah kondisi yang lebih baik. Pendidikan juga dipandang sebagai sarana paling strategis untuk mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Terdapat tiga variabel penting dalam dunia pendidikan, yaitu kurikulum, guru dan proses belajar mengajar. Salah satu variabel yang paling penting dan paling utama dalam pendidikan yaitu guru.¹

Di sekolah, terdapat dua golongan guru yaitu guru tetap atau yang berstatus PNS dan guru honorer. Guru honorer merupakan guru tidak tetap yang digaji dengan perhitungan jam mengajar yang telah ditetapkan secara resmi. SK pengangkatan untuk guru honorer atau guru tidak tetap ini ditandatangani oleh bupati daerah mereka bertugas dan ada pula SK guru honorer yang ditandatangani oleh kepala sekolah ini dinamakan guru honor sekolah.

Permasalahan honorer yang selama ini memang menjadi permasalahan kepegawaian di Negara kita saat ini. Kedudukannya yang masih menjadi dilema dalam arti apakah mereka masih diperlukan atau bahkan mungkin sudah tidak diperlukan lagi. Sebab dalam kenyataannya, dalam melakukan tugas-tugas pelayanan dalam pemerintahan, baik itu pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sebagian besar banyak dilakukan dan dikerjakan oleh pegawai honorer yang mana mereka diangkat oleh masing-masing instansi maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dalam peraturan pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2005 disebutkan bahwa tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Guru honorer di Indonesia jumlahnya masih sangat besar dibandingkan dengan guru PNS. Berdasarkan data dari laman resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jumlah guru honorer tahun ajaran 2018/2019 di wilayah Kabupaten Bone ada sebanyak 9.028 orang. Jumlah guru honorer ini hampir sama banyaknya dengan guru tetap atau guru yang berstatus PNS. Banyaknya guru honor yang tersebar di wilayah Kabupaten Bone, terkadang pemerintah maupun masyarakat tidak dapat membedakan mana yang berstatus PNS dan mana yang berstatus non PNS/ honorer. Apabila dilihat dari seragam yang mereka gunakan, seragam PNS

¹ Darmadi. 2018. *Guru Jembatan Revolusi*. Surakarta: Kekata Publisher, hal. 1.

maupun tenaga honorer tidak memiliki perbedaan. Pakaian dinas harian (PDH) yang ditetapkan pemerintah bagi PNS juga digunakan oleh honorer. PDH yang berwarna khaki hingga lencana KORPRI yang diharuskan bagi PNS juga digunakan oleh honorer. Tidak adanya perbedaan yang kasat mata antara tenaga honor dengan PNS menyulitkan pengawasan disiplin kerja mereka.

Dari kesulitan ini, pemerintah Kabupaten Bone mengeluarkan aturan bahwa seluruh tenaga honor di jajaran Pemerintah Kabupaten Bone dilarang menggunakan pakaian dinas harian namun diwajibkan menggunakan pakaian putih serta bawahan hitam yang berlaku sejak 29 April 2013. Penerapan aturan ini bertujuan agar lebih mudah membedakan antara PNS dan honorer serta memudahkan pengawasan terhadap kinerja keduanya.

Adanya aturan pakaian yang ditetapkan bagi honorer, melahirkan persepsi yang beragam dikalangan honorer itu sendiri. Desa Ulaweng Cinnong yang merupakan lokasi penelitian adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Bone yang jumlah guru honorernya ada sebanyak 27 orang. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena dari hasil observasi awal banyak persepsi dari honorer terutama guru honorer mengenai aturan pakaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Aturan pakaian ini juga memunculkan berbagai macam pihak yang pro dan kontra terhadap aturan tersebut, termasuk pihak pro dan kontra antara guru honorer di Desa Ulaweng Cinnong itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara ilmiah mengenai *“Persepsi Tenaga Honor Mengenai Aturan Pakaian Honorer (Studi Kasus: Guru Honorer di Desa Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone)”*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan deskriptif. Teknik dalam menentukan informan menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria yaitu guru honorer yang telah menjalani profesinya selama 6 tahun, yang merasakan perubahan seragam kerja dari mengenakan pakaian dinas harian yang sama dengan PNS hingga mengenakan pakaian putih bawahan hitam sesuai dengan aturan. Jumlah informan sebanyak 11 guru honorer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data menggunakan *memberchek*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Guru Honorer Mengenai Aturan Pakaian Honorer di Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone

Beberapa guru honorer setuju terhadap penerapan aturan berpakaian hitam putih bagi tenaga honorer. Persepsi guru honorer yang setuju terhadap aturan tersebut beralasan karena sebelum diterapkannya aturan pakaian honorer ini

hampir 50% guru honorer cara berpakaianya melampaui batas dibanding dengan PNS, sehingga menyebabkan terkadang adanya persaingan dalam hal berpakaian antara PNS dengan honorer. Aturan ini juga berfungsi untuk memudahkan pemerintah serta masyarakat mengetahui identitas PNS dan Honorer. Selain itu, aturan pakaian ini juga bisa digunakan sebagai perbandingan antara honorer dengan PNS.

Adapun beberapa guru honorer lainnya tidak setuju terkait aturan berpakaian hitam putih bagi tenaga honorer. Adapun persepsi bagi guru honorer yang tidak setuju dengan aturan pemerintah tersebut yaitu karena adanya perbedaan yang cukup signifikan yang sangat jelas terlihat bagi PNS dengan tenaga honorer. Dari perbedaan yang mencolok tersebut menyebabkan adanya rasa minder di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Selain itu, siswa juga cenderung meremehkan ilmu guru honorer tersebut. Persepsi guru honorer lainnya yang tidak setuju dengan aturan tersebut karena dianggap menurunkan strata sosial guru honorer dengan guru PNS yang sebenarnya mempunyai status yang sama yaitu sebagai tenaga pendidik di sekolah. Guru honorer ini beranggapan perlunya memakai seragam selayaknya guru PNS karena pada dasarnya perannya sama dengan seorang guru yang digaji oleh negara. Meskipun demikian, bagaimanapun persepsi guru honorer dengan penerapan aturan pakaian hitam putih bagi tenaga honorer, setuju maupun tidak setuju apapun aturan dari pemerintah harus diterima dan dipatuhi.

Hal ini didasari oleh teori struktural fungsional bahwa “semua elemen atau unsur kehidupan masyarakat harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa menjalankan fungsinya dengan baik”.² Selain itu juga sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa “Bila suatu perubahan sosial tertentu mempromosikan suatu keseimbangan yang serasi, hal tersebut dianggap fungsional. Namun jika perubahan sosial tersebut mengganggu keseimbangan, hal tersebut merupakan gangguan fungsional dan bila perubahan sosial tidak membawa pengaruh, maka hal tersebut tidak fungsional. Gagasan mengenai fungsi berguna agar kita terus mengamati apa yang disumbangkan oleh suatu bagian dari struktur terhadap sistem yang dianalisis.”³ Jika dikaitkan dengan hasil penelitian, persepsi dari guru honorer yang setuju terhadap aturan pakaian hitam putih tentunya berfungsi dengan baik, karena dengan adanya perbedaan pakaian antara PNS dengan honorer maka keduanya lebih mudah dibedakan serta lebih memudahkan pengawasan terhadap kinerja keduanya. Namun, aturan ini juga dapat menimbulkan disfungsi bagi guru honorer yang kontra mengenai aturan pakaian hitam putih tersebut disebabkan adanya anggapan bahwa perlunya guru honorer memakai seragam selayaknya guru PNS karena pada dasarnya perannya sama dengan seorang guru yang digaji oleh negara.

² Wirawan, I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Ganda (Fakta Sosial, Defenisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Jakarta: Prenadamedia Group, Hal. 42.

³ Ibid, Hal. 49.

2. Dampak Sosial Yang Dialami Oleh Guru Honorer Selama Diterapkannya Aturan Pakaian Honorer Di Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone

Adapun dampak sosial yang dialami oleh guru honorer selama diterapkannya aturan pakaian honorer yaitu:

a. Fungsional Bagi Guru Honorer

Perbedaan terhadap pakaian antara guru honorer dengan PNS memiliki dampak yang mana dapat dibedakan secara kasat mata. Aturan pakaian hitam putih yang ditujukan untuk pegawai honorer menyebabkan pegawai honorer dapat dengan mudah ditandai jelas di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Hal ini bisa terlihat bahwa penerapan aturan pakaian honorer fungsional bagi seluruh guru honorer sebab lebih memudahkan pemerintah, masyarakat maupun kalangan guru itu sendiri dalam melihat mana guru yang PNS maupun mana guru yang termasuk guru honorer. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa “umumnya seragam merupakan komponen penting untuk membangun identitas mereka dari sebuah usaha dibidang jasa”.⁴

Memudahkan pengawasan kinerja honorer dan PNS. Perbedaan pakaian seragam PNS dan honorer juga akan memudahkan pengawasan kinerja mereka karena adanya perbedaan pakaian tersebut dapat terlihat mana yang lebih mampu melakukan pekerjaan dengan baik antara PNS dengan guru honorer. memudahkan pengawasan disiplin kerja honorer dan PNS. Selain itu, perbedaan pakaian seragam PNS dan honorer juga akan memudahkan pengawasan disiplin kerja mereka. Dengan adanya perbedaan pakaian tersebut dapat terlihat mana yang lebih baik dalam menerapkan kedisiplinan kerja, karena honorer terkadang lebih disiplin dalam menjalankan tugas dibandingkan dengan PNS. Hal ini didasari dengan pernyataan yang mengatakan bahwa “seragam seharusnya memiliki pengaruh positif, karena seragam tersebut ikut mendorong terciptanya suasana positif.”⁵

b. Disfungsional Bagi Guru Honorer

Pertama, semangat kerja honorer berkurang. Adanya penerapan aturan pakaian honorer yang membedakan guru honorer dengan guru yang berstatus PNS, status sebagai guru sekolah yang sama namun pakaian dibedakan, guru honorer merasa semangat kerjanya berkurang. Guru honorer menganggap dengan pakaian yang berbeda membuatnya merasa dibedakan meskipun pekerjaannya yang tidak berbeda dengan guru PNS. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nelson dan Bowen bahwa “seragam tidak hanya menciptakan kesan tertentu, namun juga menjadi bagian yang ikut memengaruhi suasana yang diciptakan”.⁶

⁴ Nelson, K. & Bowen, J. 2000. *The Effect of Employee Uniforms on Employee Satisfaction*. New York: Cornell University, hal. 86

⁵ Ibid Hal. 87

⁶ Ibid. hal. 85

Kedua, kurangnya kepercayaan diri honorer. Semenjak diterapkannya aturan ini kepercayaan diri para guru honorer berkurang karena yang sebelumnya mereka menggunakan pakaian yang sama dengan PNS akhirnya dibedakan dengan memakai baju hitam putih. Guru honorer merasa minder baik dalam lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakatnya sendiri, ditambah dengan adanya persamaan-persamaan yang dilontarkan mengenai baju guru honorer dengan pekerjaan yang dianggap rendah serta benda-benda yang ada disekitar. Sesuai dengan pernyataan Nelson dan Bowen bahwa “hasil dari cara pemilihan seperti ini (yaitu seragam yang tampak buruk atau kurang fungsional) dapat memberikan pengaruh negatif pada sikap pegawai, dan dapat menimbulkan ketidakpuasan pegawai”.⁷ Selain itu juga sesuai dengan pernyataan bahwa “pakaian berperan besar dalam menentukan citra seseorang. Lebih dari itu, pakaian adalah cermin identitas, status, hierarki dan gender. Pakaian juga mencerminkan sejarah, hubungan kekuasaan, serta perbedaan dalam pandangan sosial, politik, dan religius”.⁸

PENUTUP

Persepsi guru honor mengenai aturan pakaian honorer di Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone melahirkan persepsi pro maupun kontra dikalangan honorer itu sendiri. Persepsi guru honorer yang setuju terhadap aturan pakaian beralasan karena sebelum diterapkannya aturan pakaian honorer ini hampir 50% guru honorer cara berpakaianya melampaui batas dibanding dengan PNS dan juga aturan pakaian ini bisa digunakan sebagai perbandingan antara honorer dengan PNS. Adapun persepsi guru honorer lainnya yang tidak setuju dengan aturan pakaian karena adanya perbedaan yang cukup signifikan yang menyebabkan rasa minder bagi honorer itu sendiri. Selain itu, siswa juga cenderung meremehkan ilmu guru honorer. Aturan pakian ini juga dianggap menurunkan strata sosial guru honorer.

Dampak sosial yang dialami oleh guru honorer selama diterapkannya aturan pakaian honorer di Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone menimbulkan aspek fungsional dan disfungsional bagi guru honorer. Aspek fungsionalnya yaitu honorer dan PNS secara cepat dilihat dengan jelas lebih mudah dibedakan di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Memudahkan pengawasan kinerja honorer dengan PNS karena adanya perbedaan pakaian tersebut dapat terlihat mana yang lebih mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Aturan ini juga memudahkan pengawasan disiplin kerja keduanya. Selain memiliki aspek fungsional, selama penerapan aturan pakaian honorer ini juga memiliki aspek disfungsional. Bagi guru honorer seragam khusus pakaian honorer menimbulkan kesan buruk tersendiri bagi pegawai honorer. Hal ini kemudian yang membuat semangat kerja pegawai honorer berkurang sejak penerapan aturan pakaian tersebut. Perbedaan pakaian dianggap kurang fungsional oleh beberapa

⁷ Ibid. hal. 88

⁸ Henk Schulte Nordholt (ed). 2005. *Outward Appearances*. Jakarta: LkiS Yogyakarta, hal. 57

tenaga honorer sebab dapat menurunkan citranya di lingkungan masyarakat dan cenderung diremehkan di lingkungan kerjanya. Cerminan pakaian yang menurunkan statusnya tersebut membuatnya kurang percaya diri dalam menjalani pekerjaannya

DAFTAR PUSTAKA

Darmadi. 2018. *Guru Jembatan Revolusi*. Surakarta: Kekata Publisher.

Wirawan, I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Ganda (Fakta Sosial, Defenisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Jakarta: Prenadamedia Group

Nelson, K. & Bowen, J. 2000. *The Effect of Employee Uniforms on Employee Satisfaction*. New York: Cornell University

Henk Schulte Nordholt (ed). 2005. *Outward Appearances*. Jakarta: LkiS Yogyakarta